Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Muhammad Hidayat^{1*)}, Hefrizal Handra²

¹Department of Economics, Faculty of Economics & Business, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

¹Department of Economics, Faculty of Economics, Andalas University, Indonesia

²Department of Economics, Faculty of Economics, Andalas University, Indonesia

*) email: m.hidayat@umri.ac.id

DOI: 10.37859/jae.v10i2.2285

Article Info

Article history:

Received: November 2020

Accepted: Desember 2020

Published: Desember 2020

Keywords:

Financial Performance Ratios;

Financial Capability Index;

Quadrant method;

Riau

JEL Classification:

Abstract

This paper aims to analyze the performance and financial capacity of districts/cities in Riau Province. Analyst tools used are in the form of financial performance ratios, Financial Capability Index (IKK) and the quadrant method. The results of the regional financial independence ratio show that Pekanbaru City is in the entirely independent category, Dumai City is in the underprivileged category. For the whole district, it is in a low category. The results of the quadrant method stated that Siak, Pekanbaru and Dumai were in quadrant I (ideal conditions), Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti is in quadrant III, and those in quadrant IV are Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu. The encouraging results of the IKK method state that there are no regions with low financial capacity status, there are seven regions with high status.

Paper ini bertujuan menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan berupa rasio kinerja keuangan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan metode kuadran. Hasil dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru termasuk kategori cukup mandiri, Kota Dumai termasuk kategori kurang mampu, dan untuk keseluruhan kabupaten masuk dalam kategori tidak mampu. Hasil metode kuadran menyatakan Siak, Pekanbaru dan Dumai pada kuadran I (kondisi ideal), Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti berada pada kuadran III, dan yang berada pada kuadran IV adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu. Hasil dari metode IKK menyatakan bahwa tidak ada daerah yang berada pada status kemampuan keuangan rendah, terdapat tujuh daerah berstatus tinggi.

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya serta berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Berpindahnya pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah, maka peningkatan kewenangan harus diimbangi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya telah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun rencana dan tujuan serta prioritas pembangunan di berbagai sektor di daerah (Oates, 1993). Untuk menjalankannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian *grant* kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk membiayai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai, hal ini tertuang pada UU No. 33 Tahun 2004.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber pendapatan yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah terjamin. Keuangan daerah mengandung pengertian semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah dapat mencakup aspek hak, yaitu pendapatan; dan aspek kewajiban, yaitu belanja. Untuk membiayai kewenangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, seraya tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Mengingat kajian meliputi APBD Tahun Anggaran 2016-2018, maka struktur anggaran ini akan mengambil struktur anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah gambaran perkembangan realisasi PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tabel 1: Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Miliar Rupiah), Tahun 2016-2018

Kabupaten / Kota	2016		2017		2018	
	PAD	Dana Perimbangan	PAD	Dana Perimbangan	PAD	Dana Perimbangan
Kuantan Singingi	62.18	922.76	108.03	962.85	77.08	1,019.45
Indragiri Hulu	98.73	1,047.83	159.67	1,052.05	111.90	1,057.92
Indragiri Hilir	132.44	1,370.29	214.79	1,283.45	157.48	1,363.81

Pelalawan	107.08	1,099.08	182.02	1,076.80	136.69	1,088.78
Siak	164.33	1,251.26	267.44	1,156.04	233.29	1,388.86
Kampar	162.36	1,571.30	318.19	1,525.03	229.38	1,676.34
Rokan Hulu	95.81	1,053.66	199.64	1,012.40	86.05	1,119.94
Bengkalis	199.03	2,332.55	271.15	2,591.36	319.28	2,783.23
Rokan Hilir	94.96	1,288.74	195.51	1,093.46	180.60	1,339.25
Kep. Meranti	52.41	746.50	80.94	724.24	68.01	781.60
Pekanbaru	482.03	1,230.45	697.47	1,222.25	592.71	1,277.24
Dumai	192.76	689.12	265.47	755.59	279.65	810.19

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau, BPS 2016-2018

Pada tabel 1, PAD keseluruhan daerah mengalami pertumbuhan positif di tahun 2017 dan di tahun 2018 hampir keseluruhan daerah mengalami pertumbuhan negatif kecuali Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Turun naik PAD ini mengindikasikan performa keuangan daerah yang tidak stabil dan kinerja dari daerah yang bermasalah serta mengindikasikan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk bisa mandiri atau tidak.

Dari gambaran realisasi PAD dan Dana Perimbangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Riau diatas, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Riau terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2016-2018 walaupun paket otonomi daerah telah digulirkan. Sebaliknya sebagaimana yang telah terjadi bahwa kebutuhan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah dimana pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas progam-program pembangunan di daerah.

Tuntutan kinerja yang baik seringkali diarahkan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan/kemandirian daerah. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa untuk meninjau ulang tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran adalah konsep yang menggambarkan proses untuk mengevaluasi kinerja keuangan sesuai dengan seperangkat aturan (Dicker, 2010). Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam proses pembuatan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan tuntutan untuk menghasilkan kinerja yang baik maka konsep sistem peringatan dini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem peringatan dini dalam hal ini berperan untuk memberikan peringatan dini atas hasil evaluasi kinerja keuangan pada anggaran belanja agar pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan strategis guna mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang benar.

Berdasarkan kondisi tersebut, paper ini bertujuan melakukan kajian mengenai kinerja dan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang dalam kasus ini dibatasi pada periode 2016-2018.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Basri *et al* (2013) melakukan analisis diantaranya: (1) Struktur PAD dan APBD berdasarkan komposisinya, (2) Pertumbuhan PAD serta kontribusinya terhadap APBD dan (3) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil menyimpulkan bahwa komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain-lain yang sah yaitu 42,32%, komposisi terbesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan sebesar 83,49%. Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 18,48%; rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 6,33%.

Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Dethan (2015) melakukan penelitian terkait kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2009-2013 dengan menggunakan metode indeks kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan indeks kemampuan keuangan (IKK) tinggi adalah Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Kabupaten/kota dengan IKK sedang adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten/kota dengan IKK rendah adalah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya ditemukan kabupaten/kota dengan pola keterkaitan kekuatan keuangan daerah partisipatif (51%-75%) dan konsultatif (26%-75%).

Hidayat, Hadi, & Widiarsih, (2016) mengidentifikasi dan menganalisis kinerja serta kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan berupa rasio kinerja keuangan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan metode kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan PAD tetapi tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) PAD terhadap belanja. Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah, nilai rata-rata sebesar 8,15%. Rasio Ketergantungan memiliki nilai rata-rata sebesar 42,91% yang masuk dalam kategori ketergantungan tinggi. Rasio derajat desentralisasi fiskal nilai rata-rata sebesar 6,71%. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Peta kemampuan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode indeks kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran kemampuan keuangan daerah ke arah yang lebih baik.

Kajian Haryanto (2017) memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Alat analisis dengan menggunakan metode kuadran pendekatan analisis *share* dan *growth* dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis *share*, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis *growth*, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan Transfer ke Daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik.

Penelitian Soeharjoto (2018) bertujuan untuk mengetahui kesiapan desentralisasi fiskal di Kalimantan, yang diperoleh dari peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kinerja keuangan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan berada di kuadran kedua dan ketiga yang berarti tidak ideal. Untuk Kalimantan Selatan dan Utara menunjukkan bahwa indeks kinerja keuangan daerah memiliki pola hubungan konsultatif tetapi untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki pola hubungan partisipatif.

Selanjutnya, penelitian Ningtias (2019) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bertujuan mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2012-2016. Hasil menyatakan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah sebesar 25,783% berada pada kriteria konsultatif. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah masih kurang sebesar 14,054%, namun tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah 127,561% terbilang sangat efektif dan tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan daerah 9,446% terbilang sangat efisien. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan belanja tidak

langsung 61,785% dan Belanja langsung 38,218% belum seimbang. Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur belum ideal. Dilihat dari hasil *Share* dan *Growth*, posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran II dan dari perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kemampuan Keuangannya masih tergolong tinggi dan belum efektif dan efisien.

Penelitian Purba & Mimba (2019) menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali ditinjau dari pemetaan Pendapatan Asli Daerah, indeks kemampuan keuangan, tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah; dan peta kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar berada dalam kondisi ideal. Indeks Kemampuan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali termasuk dalam kategori kemampuan tinggi. Kemandirian keuangan dikategorikan sebagai kemandirian yang rendah dan saling ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Pemetaan kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian di atas rata-rata dan tingkat kemandirian di bawah rata-rata adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.

Selanjutnya, Aristanto (2020) menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dan menganalisis keuangan daerah sebagai daya dukung pelaksanaan program sumber daya air dan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria kabupaten yang menerima Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) sebanyak 74 kabupaten. Metode analisis data menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD), Rasio Kemampuan Rutin Daerah (RKRD), Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) dengan periode pengamatan tahun 2018 dan 2019. Hasil analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan 4 variabel RMKD, RKRD, RDOF dan IKFD menjelaskan mayoritas kemampuan dan kemandirian keuangan daerah berada di rentang sangat rendah sampai dengan sedang sejumlah 60 atau 80,4% dari 74 kabupaten penerima IPDMIP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Unit analisis pada penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan time series dari tahun 2016-2018 berupa statistik keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Analisis Data

1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Halim & Kusufi, 2012):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \quad (1)$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 2. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Hersey dan Blanchard mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Halim, 2001).

Tabel 2: Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
≤ 25	Rendah Sekali	Tidak Mampu	Instruktif
25 – 50	Rendah	Kurang Mampu	Konsultif
51 – 75	Sedang	Cukup Mandiri	Partisipatif
76 – 100	Tinggi	Sudah Mandiri	Delegatif

Sumber : Hasan Basri, Syaparuddin, Junaidi - 2013

b) Rasio Ketergantungan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ketergantungan fiskal suatu daerah pada tranfer dana pusat yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak termasuk bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Transfer (DAU + DAK)}}{\text{Total Penerimaan}} \quad (2)$$

Tabel 3: Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Hidayat et al., (2016)

c) Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \quad (3)$$

Tabel 4: Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Hidayat et al., (2016)

2) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, pada tahap awal dimulai dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (4)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i - \text{PAD}_{i-1}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan: PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i ; PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah Periode $i-1$

Tabel 5 : Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KD	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD-nya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber: Bappenas(2003)

Tahap analisis kemampuan keuangan daerah berikutnya adalah dengan cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut:

$$\text{IndeksX} = \frac{\text{Nilai} \times \text{HasilPengukuran} - \text{Nilai} \times \text{KondisiMinimum}}{\text{Nilai} \times \text{KondisiMaksimum} - \text{Nilai} \times \text{KondisiMinimum}} \quad (6)$$

Berdasarkan persamaan (6), maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \quad (7)$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD); X_E = Indeks Elastisitas $\left(\frac{\text{Pertumbuhan PAD}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi}}\right)$; X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Tabel 6: Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Pada Tabel 7 dapat diketahui trend nilai rasio kemandirian daerah pada tahun 2017 keseluruhan daerah mengalami peningkatan. Selanjutnya hasil lain bahwa daerah dengan status kota memiliki nilai berkisar antara >25%-50% yang mana masuk dalam kategori kemampuan keuangan rendah dengan tingkat kemandirian kurang mampu dan 51%-75% kategori sedang dengan tingkat kemandirian mampu, adapun daerah yang dengan kategori sedang yakni Kota Pekanbaru, dan untuk kategori rendah adalah Kota Dumai. Sementara itu untuk daerah kabupaten keseluruhannya masih dalam kategori rendah sekali dengan tingkat kemandirian tidak mampu. Kabupaten dengan nilai rasio kemandirian terendah yakni Kab Kuantan Singingi dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 8.51% dan untuk nilai tertinggi yakni Kab Siak dengan nilai rata-rata sebesar 17.69%. Perbedaan hasil rasio antara kotamadya dengan kabupaten tersebut memberikan bukti bahwa wilayah perkotaan memiliki kemandirian keuangan daripada wilayah kabupaten.

Tabel 7: Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2016-2018

Kategori	Rasio Kemandirian		
	2016	2017	2018
Rendah Sekali	Keseluruhan Kabupaten	Keseluruhan Kabupaten	Keseluruhan Kabupaten
Rendah	Pekanbaru, Dumai	Dumai	Pekanbaru, Dumai
Sedang	-	Pekanbaru	-
Kategori	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah		
	2016	2017	2018
Sangat Rendah	Bengkalis	-	-
Rendah	-	Bengkalis	Bengkalis
Sedang	Siak	Siak	Siak
Cukup	Rokan Hilir	Rokan Hilir	Rokan Hilir
Tinggi	Pelalawan, Kampar, Kep. Meranti, Pekanbaru, Dumai	Pelalawan, Kampar, Pekanbaru, Dumai	Pelalawan, Kampar, Pekanbaru, Dumai
Sangat Tinggi	Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu	Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kep. Meranti	Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kep. Meranti
Kategori	Rasio Desentralisasi Fiskal		
	2016	2017	2018
Sangat Kurang	Keseluruhan kabupaten	Kuantan Singingi, Bengkalis, Kep. Meranti	Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Kep. Meranti
Kurang	Dumai	Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir	Siak, Rokan Hilir
Sedang	Pekanbaru	Dumai	Dumai, Pekanbaru
Cukup	-	Pekanbaru	-
Baik	-	-	-
Sangat Baik	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2020

Selanjutnya untuk daerah penghasil migas terbesar yaitu Kab Bengkalis hanya memperoleh nilai rata-rata berkisar dari 10% hal ini dikarenakan bagi hasil sumber daya alam merupakan komponen dana perimbangan dan apabila bagi hasil dikeluarkan dari dana perimbangan maka daerah ini dapat tergolong ke daerah yang rendah ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilihat pada nilai rasio ketergantungan nya hanya sebesar 10%.

Hasil rasio ketergantungan daerah yang ada pada Tabel 7 sangat beragam pada wilayah kabupaten maupun kota, yang mana secara nilai rata-rata daerah dengan kategori ketergantungan sangat rendah yakni hanya Kab Bengkalis, kemudian daerah dengan kategori ketergantungan sedang yakni Kab Siak, daerah dengan kategori cukup adalah Kab Rokan Hilir, daerah dengan kategori ketergantungan tinggi yakni Kab Kampar, Kab Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, dan daerah dengan kategori sangat tinggi adalah Kab Kuantan Singingi, Kab Indragiri Hulu, Kab Indragiri Hilir, dan Kab Kep. Meranti. Selanjutnya, daerah yang termasuk kategori sangat rendah hingga sedang merupakan daerah yang penerimaan bagi hasil dari sumber daya alam nya besar sehingga daerah ini tidak terlalu bergantung dengan DAU dan DAK.

Berdasarkan Tabel 7, apabila dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah keseluruhan wilayah kabupaten berada pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten belum mampu untuk berotonomi. Sementara itu untuk Kota Dumai berada pada pola hubungan konsultatif, daerah ini dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan untuk Kota Pekanbaru berada pada pola hubungan partisipatif dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Pada Tabel 7 terlihat dengan jelas bahwa secara rata-rata kemampuan daerah kabupaten dalam membiayai rumah tangga mereka masih dalam kategori sangat kurang dan kurang. Hal ini tentu tidak lepas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih kecil jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Adapun kabupaten yang termasuk dalam kategori sangat kurang yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti, dan kabupaten dengan kategori kurang adalah Siak dan Kampar. Sementara itu untuk daerah kotamadya berada pada kategori sedang. Keseluruhan daerah untuk dapat terus meningkatkan pendapatan daerahnya agar dikemudian hari tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan hasil dari kinerja daerah, kita harus mengingat batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan PAD yang mana sebagian besar pemungutan pajak merupakan kewenangan pusat (e.g PPh dan PPn) alias disetor ke pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah harus lebih berstrategi dalam pengembangan pendapatan daerah misalnya menerapkan NPWP Cabang bagi pelaku usaha.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil kuadran pada Tabel 8, beberapa daerah terjadi pergeseran selama periode 2016-2018. Untuk wilayah kotamadya terjadi pergeseran dari kuadran 1 ke 2 di tahun 2017 dan kembali ke kuadran 1 di 2018. Wilayah kabupaten yang terjadi pergeseran menurun dari kuadran 3 ke kuadran 4 adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu hal ini disebabkan pertumbuhan PAD-nya menurun serta perannya dalam APBD kecil, sementara daerah ini juga memiliki hasil sumberdaya alam yang melimpah terutama sektor perkebunan kelapa sawit. Penurunan peran PAD ini tentu saja bukan sepenuhnya menjadi kesalahan daerah sementara sumber-sumber penerimaan potensial justru dikelola langsung oleh pemerintah pusat, disisi lain upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah

bisa jadi tidak efektif dikarenakan sangat membebani masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Sebaliknya, terjadi juga pergeseran menaik dari kuadran 4 ke kuadran 3 yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti. Pergeseran menaik lainnya terjadi pada Kabupaten Siak dari kuadran 2 ke 1, pergeseran yang ekstrim terjadi pada Kabupaten Kampar dari kuadran 4 tahun 2016 ke 1 di tahun 2017 dan kembali ke kuadran 4 di tahun 2018 hal ini terjadi dikarenakan pertumbuhan PAD yang tidak stabil, sebagaimana diketahui bahwa peningkatan nilai PAD yang besar ditahun 2017 yang hampir dua kali lipat dari tahun 2016 dan kembali menurun ditahun 2018 dengan porsi penurunan yang hampir sama dengan kenaikan dari tahun sebelumnya untuk itu diharapkan daerah ini agar dapat menjaga sumber-sumber PAD yang ada dan mengembangkan potensi-potensi lain bukan dari sekedar bergantung kepada sumber daya alam.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar untuk menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki. Namun demikian, tidak seluruh kabupaten dan kota siap untuk memasuki era ini. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berikut ini memberikan gambaran tingkat kesiapan daerah dalam era otonomi ini.

Tabel 8: Kuadran Kemampuan Keuangan dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2016-2018

Kabupaten / Kota	Kuadran			IKK		
	2016	2017	2018	Point	Peringkat	Status
Kuantan Singingi	3	3	4	0.43	2	Sedang
Indragiri Hulu	4	4	4	0.40	2	Sedang
Indragiri Hilir	3	4	4	0.47	1	Tinggi
Pelalawan	3	3	4	0.51	1	Tinggi
Siak	2	2	1	0.51	1	Tinggi
Kampar	4	1	4	0.40	2	Sedang
Rokan Hulu	3	3	4	0.46	1	Tinggi
Bengkalis	4	4	3	0.51	1	Tinggi
Rokan Hilir	4	3	3	0.49	1	Tinggi
Kep. Meranti	3	4	3	0.41	2	Sedang
Pekanbaru	1	2	1	0.44	1	Tinggi
Dumai	1	2	1	0.50	1	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil dari metode IKK menyatakan bahwa tidak ada daerah yang berada pada status kemampuan keuangan rendah, daerah dengan status sedang berjumlah empat kabupaten yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, dan Kep. Meranti, untuk daerah berstatus tinggi terdiri dari enam kabupaten (Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir) dan dua kotamadya (Pekanbaru dan Dumai) hal ini memberikan indikasi adanya kesiapan daerah dalam era otonomi, khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan, kekayaan serta sumber-sumber potensial lain yang dimiliki. Dari hasil positif ini diharapkan pemerintah kabupaten yang berada di status sedang untuk tetap meningkatkan performa kinerja pengelolaan keuangan baik dari segi infrastruktur penunjang maupun dari sumber daya manusia.

Pengelolaan belanja juga diperhatikan pada penganggaran. Dalam demokrasi modern, politisi berperan membuat keputusan tentang pengeluaran publik, bahwa pengeluaran publik melibatkan pendelegasian, dan karenanya, terjadi hubungan *voter by being elected*. Politisi yang terpilih dapat mengambil keuntungan dari masa jabatannya, yaitu, menggunakan sebagian dana yang dipercayakan kepada mereka untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, baik itu langsung dalam korupsi, untuk tunjangan, atau hanya pemborosan (Von Hagen, 2002).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya: 1) Daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah pada kategori sedang atau cukup mandiri adalah Kota Pekanbaru, kategori rendah atau kurang mampu yakni Kota Dumai, dan untuk keseluruhan kabupaten masuk dalam kategori rendah sekali atau tidak mampu; 2) Wilayah dengan rasio ketergantungan sangat rendah adalah Bengkalis, kategori sedang adalah Siak, kategori cukup adalah Rokan Hilir, kategori tinggi yakni Kab Kampar, Kab Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, dan daerah dengan kategori sangat tinggi adalah Kab Kuantan Singingi, Kab Indragiri Hulu, Kab Indragiri Hilir, dan Kab Kep. Meranti; 3) Desentralisasi Fiskal yang termasuk kategori sangat kurang yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti, dan kategori kurang adalah Siak dan Kampar, pada kategori sedang adalah Pekanbaru dan Dumai; 4) Hasil metode kuadran menyatakan Siak, Pekanbaru dan Dumai pada kuadran I (kondisi ideal), Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti berada pada kuadran III, dan yang berada pada kuadran IV adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu; 5) Hasil IKK daerah yang termasuk status sedang adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Kep. Meranti, yang termasuk status tinggi adalah Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis Rokan Hilir, Pekanbaru dan Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanto, E. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Daya Dukung Pelaksanaan Program Sumber Daya Air dan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.466>
- Bappenas. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Jakarta.
- Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81–90. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/1497>
- Dethan, S. H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013. *GaneÇ Swara*, 9(2), 145–151. Retrieved from <http://unmasmataram.ac.id/2015/09/05/25-stevany-2/>
- Dicker, J. (2010). How Should We Measure Public Sector Performance? *Viewpoint Paper for the 2020 Public Services Trust*, 1–18. London, England: Public Services Trust at the RSA.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M., Hadi, M. F., & Widiarsih, D. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*, 4(2), 36–55.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ningtias, Y. D. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016*. Universitas Islam Majapahit.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. Retrieved from <https://www.ntanet.org/NTJ/46/2/ntj-v46n02p237-43-fiscal-decentralization-economic-development.pdf>
- Purba, I. B. A. H., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Analysis on the Regional Financial Performance of Regencies/Cities in Bali Province. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 24(1(9)), 20–33. <https://doi.org/10.9790/0837-2401092033>
- Soeharjoto. (2018). Kemampuan dan kinerja keuangan provinsi kalimantan. *AKUNTABEL*, 15(2), 131–138. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Von Hagen, J. (2002). Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review*, 33(3), 263–284. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/RePEc:eso:journl:v:33:y:2002:i:3:p:263-284>